

PELARANGAN PENGGUNAAN PRODUK HUAWEI DI AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN *NATIONAL DEFENSE AUTHORIZATION ACT* (NDAA) 2019

Endri Setiawan¹, Yuniarti², Tedy³

¹Universitas Mulawarman (Correspondence Email: endrisetiawan2605@gmail.com)

²Universitas Mulawarman

³Universitas Mulawarman

ABSTRACT (English)

Huawei's market development in the US are causing concern for the US Government. This led to it enacting NDAA 2019. This article aims to explain the premises of the enactment of the United States National Defense Authorization Act (NDAA) 2019 article 899 regarding the prohibition of the use of Huawei products. The type of research used in this research is explanative with secondary data types. The analysis technique used is qualitative. The theory used is the theory of Protectionism. The results of this study indicate that the 2019 ban on the use of Huawei products in the US based on the NDAA 2019 is based on three reasons. The first reason is the US desire to win the 5G market as an effort to protect the US cooperation in 5G development and to realize the US commitment as a world technology leader. The second reason is the alleged dumping and violation of Huawei's human rights, which can damage the value of the US domestic market and conflict with US national interests. The third reason is the insecurity of Huawei products due to the many violations committed by Huawei regarding intellectual property rights, espionage activities and trade agreement violations which are strong reasons for the implementation of the NDAA 2019.

Keywords: *US National Defense Authorization Act 2019, United States, Huawei, Protectionism, Prohibition*

ABSTRAK (Bahasa)

Perkembangan pasar Huawei di AS menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah AS. Hal ini menyebabkan diberlakukannya NDAA 2019. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan premis berlakunya United States National Defense Authorization Act (NDAA) 2019 pasal 899 tentang larangan penggunaan produk Huawei. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif dengan jenis data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Proteksionisme. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan penggunaan produk Huawei di AS tahun 2019 berdasarkan NDAA 2019 didasarkan pada tiga alasan. Alasan pertama adalah keinginan AS untuk memenangkan pasar 5G sebagai upaya melindungi kerja sama AS dalam pengembangan 5G dan mewujudkan komitmen AS sebagai pemimpin teknologi dunia. Alasan kedua adalah adanya dugaan dumping dan pelanggaran HAM Huawei yang dapat merusak nilai pasar domestik AS dan bertentangan dengan kepentingan nasional AS. Alasan ketiga adalah ketidakamanan produk Huawei karena banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Huawei terkait hak kekayaan intelektual, kegiatan spionase dan pelanggaran perjanjian perdagangan yang menjadi alasan kuat pelaksanaan NDAA 2019.

Kata Kunci: *US National Defense Authorization Act 2019, Amerika Serikat, Huawei, Proteksionisme, Prohibition*

PENDAHULUAN

Amerika Serikat adalah negara terdepan dalam pengembangan teknologi, AS mengalokasikan dana sebesar US\$ 1,833 juta pertahun khusus untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. AS dianggap negara yang berhasil mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam banyak sektor, menyebabkan negara-negara lain tertarik menjalin kerja sama ekonomi baik perdagangan maupun investasi dengan AS, salah satunya Huawei (*National Science Board, 2018*).

Pada tahun 2001, Huawei yang merupakan perusahaan swasta asal China ini mulai menjalin hubungan kerja sama dengan AS. Meskipun Huawei baru berinvestasi dan masuk ke pasar AS di awal tahun 2000an, nilai investasi Huawei di AS terus meningkat. Hal ini terlihat dari data tahun 2017 dan 2018, Nilai investasi Huawei di Amerika pun cukup besar mencapai 47,885 juta Yuan di tahun 2018 nilai investasi tersebut tumbuh 21,3% dari tahun sebelumnya. Investasi tersebut meliputi bisnis jaringan operator, bisnis industri, dan pelayanan konsumen dibawah naungan langsung Huawei Technologies Co. Ltd (*Huawei In America, 2012*).

Namun kerja sama yang terjalin antara Huawei dan AS ini mengalami beberapa masalah yang cukup rumit. Muncul tuduhan dari pemerintahan AS atas keterlibatan Huawei dalam operasi bisnis Skycom yang melanggar *Export Administration Regulation (EAR)* di AS. Permasalahan ini melibatkan salah satu petinggi Huawei *Chief Financial Officer (CFO)* Meng Wanzhou (www.justice.gov).

Pada tahun 2018, untuk merespon masalah yang terjadi pada Huawei. AS dibawah pemerintahan Presiden Donald Trump bersama Senat, bersama-sama menandatangani Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional yang secara sah akan berlaku di tahun 2019 atau yang dikenal secara umum sebagai *National Defense Authorization Act (NDAA)* 2019. Pelarangan produk Huawei dijelaskan dalam pasal 899, yang isinya melarang setiap Kepala Badan Eksekutif

Agensi AS untuk memperoleh atau memperpanjang kontrak yang berupa sistem, peralatan, ataupun layanan yang berasal dari *covered communications equipment and services* yang diartikan sebagai Huawei serta pihak-pihak yang terkait atau bagian dari Huawei Technologies Co. Ltd (John S. McCain, *H.R.5515, 2019*).

Pelarangan Huawei dalam NDAA 2019, mengakibatkan Huawei dimasukan dalam daftar *Entity List* dari *Beurau of Industry and Security* (John S. McCain, *H.R.5515, 2019*) dan Departemen Perdagangan AS pada tanggal 15 mei 2019. Mengakibatkan adanya pembatasan pada kegiatan ekspor dan impor Huawei karena Huawei dianggap sebagai salah satu perusahaan yang memiliki resiko yang dapat mengancam keamanan nasional AS yang dampaknya merugikan pada pihak Huawei maupun perusahaan-perusahaan AS yang sudah menjalin kerja sama dengan Huawei (www.efcr.gov).

Keberadaan Huawei di AS sebenarnya bukan menjadi ancaman besar untuk persaingan pasar AS terbukti dari data *market share mobile vendors* AS tahun 2018, nilai *market share* Huawei hanya 0,92% dan di tahun 2019 naik menjadi 0,97% berbanding terbalik dengan market share Apple yang mencapai 55% di pasar AS ([gs.satecounter.com, 2019](http://gs.satecounter.com)). Kebijakan AS ini juga bertentangan dengan mekanisme persaingan pasar sempurna dan nilai inti dari liberalisme serta kapitalisme yang diusung AS. Kebijakan ini pula berpotensi melanggar asas resiprokal dengan China yang berdampak negatif pada hubungan kedua negara. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pelarangan AS terhadap penggunaan produk Huawei berdasarkan Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional Tahun 2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Proteksi terhadap pasar domestik AS dari ekspansi produk Huawei juga dijelaskan dalam penelitian Yasin Yayang Sibarani (2019) yang berjudul Alasan Di Balik Kebijakan Restriktif Amerika Serikat Terhadap Operasi Bisnis Huawei. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana tindakan

restriktif pemerintah AS masa Trump terhadap perdagangan dan operasi bisnis Huawei di AS, terutama setelah Huawei mengembangkan inovasi jaringan internet 5G-nya.

Pengembangan teknologi 5G ini dikhawatirkan akan menjadi ancaman berupa spionase terhadap keamanan AS, baik untuk negara, perusahaan maupun masyarakat AS. Kekhawatiran ini didasarkan pada peningkatan serangan siber terhadap fasilitas vital AS selama 2009-2011. Hal ini juga diperkuat dengan jalinan kerjasama di bidang siber dengan AS yang dianggap menjadi jalan masuk bagi Huawei untuk melakukan kegiatan spionase dan pencurian data digital di AS.

Meskipun Huawei tidak terbukti melakukan spionasi, pada Januari 2019, Kementerian Perdagangan AS memasukkan Huawei dalam daftar entitas berbahaya dan dianggap melanggar *International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)* yang diberlakukan sejak 1977. Tindakan AS ini mendapat reaksi negatif dari Huawei yang menyangkal tuduhan tersebut dan menganggap pemerintah AS mengkhawatirkan sesuatu yang tidak terjadi, mengkritik pemerintah China yang diduga menggunakan Huawei untuk melakukan spionase dan mengkritik perusahaan China. Selain itu, Huawei juga berpendapat bahwa di lain pihak, AS sendiri justru menyebarkan mata-mata di seluruh dunia. Lebih lanjut, Huawei akhirnya menempuh jalur hukum dengan tuntutan bahwa pemerintahan AS melakukan kegiatan di luar konstitusi untuk menuduh Huawei melakukan tindakan spionase dan adanya keterkaitan dengan pemerintahan China.

Meskipun demikian, AS tidak menghentikan kebijakan restriktifnya terhadap Huawei. Alasan tindakan ini dilihat dari dua hal. Pertama, kepentingan AS untuk meningkatkan konsumsi masyarakatnya terhadap produk domestik. Perkembangan pasar Huawei di AS sangat menguntungkan bagi Huawei dan Pemerintah China yang menjalankan Kebijakan *Going Out* atau Program *Made in China 2025*. Pasar AS dianggap pasar potensial untuk menopang kejayaan perekonomian China secara umum.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan kepentingan ekonomi AS yang tetap ingin mempertahankan dominasinya di pasar domestik. Kedua, adanya persaingan industri teknologi 5G antara AS dan China.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pelarangan penggunaan produk Huawei di AS berdasarkan NDAA 2019. Studi ini merupakan studi kepustakaan dengan menggunakan data kualitatif yang bersifat skunder. Konsep yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang diangkat adalah proteksionisme.

Proteksionisme pada umumnya memiliki definisi berupa kebijakan yang dibuat secara sengaja oleh sebuah pemerintahan untuk memproteksi atau melindungi pasar dan produsen domestik dari persaingan global. Secara umum proteksionisme dipahami sebagai kebijakan yang kurang menguntungkan bagi perdagangan bebas karena berdampak pada peningkatan harga impor dan penggunaan sumberdaya yang tidak efisien. Tetapi penerapan kebijakan yang bersifat memproteksi pasar domestik disadari memiliki konsekuensi, namun mereka secara jelas memahami juga manfaat setimpal yang akan di dapatkan (Dunkley, 2004).

Berdasarkan bentuk kebijakannya proteksionisme dapat dibedakan menjadi dua bentuk dasar dalam penerapannya. Pertama, bentuk yang paling umum adalah *old protectionism* yang penerapannya instrumen hambatannya berupa tarif dan kuota impor. Namun setelah munculnya agenda perdagangan bebas dan liberalisme yang bertujuan menghilangkan hambatan tarif dalam perdagangan mengakibatkan pada pergeseran instrumen dalam proteksionisme sehingga memunculkan bentuk baru proteksionisme. Kedua, *new protectionism* adalah bentuk baru dari proteksionisme lama dengan instrumen hambatannya lebih kepada non-tarif sehingga bentuk kebijakannya tidak transparan (Salvatore, 1993).

Namun pada dasarnya kedua bentuk proteksionisme ini memiliki maksud yang

sama yaitu keberpihakan pada produsen domestik atau produsen dalam negeri untuk melindungi dari kompetitor luar. Tetapi pada penerapannya kedua bentuk proteksionisme ini tidak dapat dihilangkan secara menyeluruh terlebih hambatan non-tarif pada *new protectionism* yang akan terus berkembang mengikuti zaman. Maka dari itu diperlukan definisi yang lebih mendalam dan fungsional untuk memudahkan melihat perkembangan pemahaman serta kebijakan dalam proteksionisme.

Untuk memahami perkembangan proteksionisme moderen secara mendalam Philip I Levy dalam *Imaginative Obstruction: Modern Protectionism in the Global Economy* secara detail mendefinisikan kebijakan proteksionisme dalam tiga kategori yang berbeda berdasarkan fungsi dan intensi dilihat dari sifat dan bentuk instrumen yang digunakan dalam sebuah kebijakan proteksionisme, yakni sebagai berikut (Levy, 2009).

Pertama, *Intentional Protectionism*, adalah bentuk dari proteksionisme yang paling mudah diidentifikasi karena bentuknya yang transparan sehingga rumusan kebijakannya menyatakan keberpihakan kepada industri domestik secara eksplisit, berupa penerapan tarif impor, subsidi ekspor, dan kuota. Jenis proteksionisme ini sering ditemukan dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang terdapat di negara-negara berkembang yang perekonomiannya masih bertumpu pada komunitas manufaktur dan produk-produk pertanian.

Kedua, *Incidental Protectionism*, merupakan proteksionisme yang dampaknya secara jelas dapat dilihat sama seperti yang ada pada *Intentional Protectionism*. Tetapi ada perbedaan utama, yaitu terdapat pada cara kerjanya yang tidak langsung. Dalam artian kebijakan yang ditetapkan dalam proteksionisme ini menggunakan instrumen yang berupa ketetapan atau syarat-syarat sebagai bentuk dari legitimasi yang kuat bagi produk dari luar untuk masuk ke pasar domestik. dan menggunakan kebijakan non-perdagangan dalam proteksionisme untuk menyamakan efek diskriminatif tanpa

mengurangi dampak yang ada.

Ketiga, *Instrumental Protectionism*, bentuk dari proteksionisme ini bertumpuan pada keseimbangan politik, karena dalam upaya penetapannya ada pengaruh politik yang sangat kuat dalam proteksionisme ini. Sehingga proteksionisme ini sangat tidak transparan yang tujuannya menetapkan kebijakan perdagangan sebagai alat politik untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan politik yang ada di negara lain. Kebijakan dalam proteksionisme ini adalah berupa ancaman dan geretakan untuk menciptakan perubahan politik yang dampaknya mempengaruhi hubungan politik antarnegara, namun kebijakan ini bisa saja tidak dilakukan jika tujuan sudah tercapai.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Huawei merupakan perusahaan penyedia infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perangkat pintar terbesar di China. Huawei juga memiliki sekitar 197,000 karyawan yang beroperasi di lebih dari 170 negara dan wilayah menjadikan Huawei sebagai salah satu *Multi National Corporation* (MNC) terbesar di dunia. Pelarangan yang dilakukan AS terhadap produk Huawei dalam NDAA 2019, merupakan upaya nyata yang dilakukan pemerintahan AS untuk melindungi negara dari ancaman kejahatan digital dalam produk-produk Huawei yang dikategorikan sebagai *covered communications equipment and services* (Herd, 2021). Berikut hasil dan pembahasan secara mendalam terkait pelarangan produk Huawei dalam artikel ini:

A. Pasar Huawei

Huawei Technologies Co., Ltd didirikan pada tahun 1987, oleh seorang mantan tentara nasional China atau *People Liberation Army* (PLA) dengan pangkat terakhir mayor bernama Ren Zhengfei. Pada tahun 1983, dengan latar belakang seorang insinyur sipil yang bekerja untuk membangun jembatan dan pabrik (Tao, 2015).

Kegiatan utama bisnis Huawei adalah penyedia infrastruktur TIK dan perangkat pintar global terkemuka, dengan infrastruktur

TIK sebagai salah satu bisnis inti Huawei. Fokus utama pada distribusi, interaksi, transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan informasi. Huawei menggunakan produknya sebagai solusi bagi kebutuhan layanan teknologi informasi yang lebih inovatif dan terdepan untuk membantu pelanggan Huawei membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (Huawei *Annual Report*, 2020).

Huawei merilis laporan tahunan untuk paruh pertama 2019. Pendapatan penjualan adalah 401,3 miliar yuan, naik sekitar 23,2 %, dengan tingkat laba bersih 8,7%. Sedangkan pendapatan operasional pada bisnis jaringan operator adalah 146,5 miliar Yuan dan Pendapatan bisnis konsumen adalah 220,8 miliar yuan, terhitung 55%. Dibandingkan dengan data tahun 2017, pendapatan bisnis konsumen adalah 105,4 miliar Yuan, dan 220,8 miliar Yuan tahun ini artinya ada peningkatan yang cukup tinggi dan berdampak baik untuk perusahaan (Huawei *Annual Report*, 2019).

Adapun strategi penjualan yang dilakukan Huawei adalah dengan memanfaatkan kombinasi saluran online dan offline. Huawei bekerja dengan perusahaan e-commerce besar seperti mal JD China, GOME online, dan Amazon di Amerika Serikat. Menurut statistik Counterpoint di kuartal pertama tahun 2019, Huawei dan Honor menyumbang 40% dari penjualan ponsel online di Cina, jauh lebih tinggi dari merek lain (Huawei *Annual Report*, 2019).

B. Bisnis Huawei di AS

Pada tahun 2001, Huawei memulai salah satu kegiatan bisnisnya di AS dengan membuka pusat penelitian dan pengembangan di kota Plano, Collin County negara bagian Texas. Setelah berhasil membangun pusat penelitian dan pengembangan di AS, Huawei mulai menjalin gegosiasi untuk mendapatkan kontrak besar dari operator papan atar seperti AS , AT&T, Sprint, T-Mobile dan Verizon namun pada saat itu kesepakatan gagal karena terhalang perizinan dari pemerintahan AS (Steinbock, 2012).

Tabel 1. Perkembangan Bisnis Huawei di AS

Perkembangan Bisnis Huawei di AS	
2003	Maret 2003, Huawei dan 3Com Corporation membentuk perusahaan patungan, Huawei-3Com (H3C), yang berfokus pada R&D, produksi dan penjualan produk jaringan data.
2006	Perusahaan kemudian mendivestasikan 49% saham di H3C seharga US\$ 880 juta pada tahun 2006
2007	Upaya Huawei untuk membeli 3Com digagalkan oleh pemerintah AS. Huawei dan perusahaan keamanan AS Symantec mengumumkan pada Mei 2007 pembentukan perusahaan patungan yang berbasis di Chengdu, untuk mengembangkan teknologi berbasis keamanan dan penyimpanan untuk dipasarkan ke operator telekomunikasi.
2010	Huawei berusaha untuk mengakuisisi perusahaan komputasi <i>cloud</i> asal California yang sudah pailit bernama 3Leaf Systems pada Mei 2010 seharga US\$ 2 juta. Pada musim gugur 2010, Sprint Nextel meminta tawaran kerja sama untuk peningkatan jaringan, yang mungkin akan diberikan kepada Huawei jika tidak ada intervensi lain dari Kongres dan Menteri Perdagangan AS.
2011	Pada awal 2011, regulator AS menagguhkan akuisisi 3Leaf karena dianggap ilegal.
2012	Pada musim semi 2012, Huawei-Symantec, perusahaan patungan antara Huawei dan Symantec, berhenti berdagang dan meninggalkan Amerika Serikat, menyusul blokade beberapa akuisisi oleh pemerintah AS.

Sumber: Diolah Penulis dari berbagai sumber.

Upaya-upaya Huawei untuk ada di pasar AS tidak berjalan mulus. Faktanya Huawei secara konsisten telah ditolak untuk melakukan kegiatan investasi besar dan mendapatkan kontrak besar di AS. Pejabat pemerintah AS telah melakukan intervensi pada beberapa kegiatan bisnis Huawei dan memblokir akuisisi potensial dan kontrak yang di rencanakan Huawei. Membuat nilai perusahaan Huawei di pasar AS sangat rendah dan sulit untuk bersaing dengan perusahaan lokal di AS.

Dari data *US Mobile Device Share*

Market 2018, share market Huawei di AS sangat kecil hanya 0.92% di sepanjang tahun 2018, berbanding terbalik dengan pencapaian Apple yang mencapai angka 54.82% di tahun yang sama. Walaupun *Share Market* Huawei kecil di pasar AS tetapi Huawei menjadi salah satu perusahaan yang memiliki daya saing yang tinggi di AS dengan harga produk yang cenderung memiliki nilai ekonomis sebagai contoh smartphone 5G pertama Huawei yaitu Mate 20 X untuk varian tertinggi hanya US\$ 900 pada tahun 2019, berbanding dengan Apple yang merilis smartphone 5G pertama mereka yaitu iPhone 12 series dengan varian tertinggi Pro Max dengan harga US\$ 1,099 pada tahun 2021 (www.counterpointresearch.com,2021).

Walaupun *share market* Huawei di AS sangat kecil, namun tahun 2019 pendapatan global Huawei mencapai US\$ 122 miliar menjadikan Huawei salah satu perusahaan MNC dengan penghasilan terbesar di dunia. Dengan penghasilan yang besar Huawei juga membutuhkan biaya produksi yang besar, dari data analisis Wall Street memperkirakan bahwa Huawei menghabiskan sekitar US\$ 70 miliar pertahun untuk belanja komponen peralatan teknologi, dan dari total belanja komponen Huawei US\$ 11 miliar diantaranya masuk ke perusahaan-perusahaan AS seperti Qualcomm, Intel Corp, dan Micro Technology (Huawei *Annual Report, 2019*).

C. Pelarangan Huawei Dalam NDAA 2019

Untuk memahami secara mendalam pelarangan Huawei dalam NDAA 2019, perlu dipahami pula peraturan yang sebelumnya berlaku dalam yaitu NDAA 2018. Dalam NDAA 2018, AS menerapkan pembatasan terkait Huawei ke dalam Undang-undang federal di luar konteks alokasi militer yaitu pada pasal 1656. *Security of Nuclear Command, Control, and Communication System From Commercial Dependencies*, yang intinya NDAA 2018 melarang DOD (*Department of Defense*) untuk mengadakan peralatan atau layanan telekomunikasi dari Huawei dan lainnya sebagai bagian dari misi DOD terkait pencegahan nuklir dan

pertahanan negara (115TH Congres 1st Seesion, H.R. 2810, 2018).

Pada pratiknya NDAA 2018, tidak memberikan dampak yang signifikan pada aktifitas bisnis Huawei karena perusahaan yang berhubungan dengan Huawei masih mendapat kelonggaran untuk tetap menjalankan kerja sama, sehingga NDAA 2018 mendapat pembaharuan di NDAA 2019. Pembatasan dan pelarangan pada NDAA2018 terbatas pada lembaga federal tertentu, namun dalam NDAA 2019 pasal 889, melakukan pelarangan perangkat Huawei secara lebih luas. Dalam artian pembatasan terkait berlaku di seluruh cabang eksekutif pemerintahan AS (John S. McCain, *H.R.5515, 2019*).

Alasan pelarangan oleh Pemerintah AS ini dijelaskan dengan perspektif proteksionisme dari Philip I Levy yaitu *intentional, incidental, dan instrumental protectionism*.

1. Keinginan AS Memenangkan Pasar 5G

AS merupakan negara terdepan dalam pengembangan teknologi dengan biaya R&D dalam bidang teknologi mencapai 1,833 juta US\$ pertahun, dari total R&D tahunan AS yang mencapai US\$ 612.714 miliar, menjadikan AS sebagai negara dengan biaya R&D terbesar di dunia di atas China yang biaya R&D tahunan mencapai US\$ 514.798 miliar dan Jepang di peringkat ketiga dengan total R&D mencapai US\$ 172.614 miliar (*National Science Board, 2018*).

Dengan nilai R&D yang cukup besar pemerintahan AS mengharapkan banyak inovasi baru dalam pengembangan teknologi AS. Yang terbaru AS adalah salah satu negara yg fokus dalam pengembangan infrastruktur teknologi jaringan generasi terbaru yaitu 5G.

Pengembangan 5G menjadi sangat penting bagi AS dikarenakan pembangunan infrastruktur 5G sangat dibutuhkan AS untuk menunjang mobilitas digital baik pada sektor industri maupun sektor pemerintahan AS. Dengan kecepatan transfer data mencapai 20 Gigabit per detik akan memenuhi kebutuhan transfer data yang lebih efisien, dan hal tersebut sangat dibutuhkan AS dalam industri digital

mereka. Serta AS sudah memiliki banyak kerja sama strategis dalam pengembangan jaringan generasi terbaru dan terkoneksi 3G,4G,dan 5G.

R&D 5G sudah dimulai dari tahun 2012, dilakukan di beberapa negara seperti Jepang, AS, dan Inggris, namun uji coba 5G pertama sudah dilakukan Samsung di akhir tahun 2014, dan pada tahun 2017 sekitar 77 operator jaringan di 49 negara siap menjalankan jaringan 5G. Perilisan jaringan 5G di percepat di tahun 2019. Ada tiga operator utama yang dipercaya AS untuk memulai pembangunan infrastruktur 5G di negaranya yaitu AT&T, Verizon, dan T-Mobile untuk menghubungkan jaringan 5G di 19 kota besar yang ada di AS (Ahters, 2013).

Beberapa perusahaan MNC yang bekerja sama langsung dengan AS dalam upaya percepatan pengembangan teknologi 5G adalah Ericson dari Swedia, Swisscom dari Swiss dan Vodafone dari Inggris. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sama membangun fasilitas 5G terintegrasi untuk AS dan Uni Eropa, Serta untuk di wilayah Asia AS memilih perusahaan asal Korea Selatan yaitu Korean Telcom dan SK Telcom yang dianggap AS sebagai perusahaan terdepan di Asia sebagai pengembang 5G. Dari kerja sama dengan AS, Korea Selatan secara terbatas sudah menggunakan 5G pada Olimpiade Musim Dingin Tahun 2018. Keberhasilan 5G dalam Olimpiade Musim Dingin 2018, menjadikan Korea Selatan negara pertama yang menggunakan 5G secara komersial di awal tahun 2019 (Ahters, 2013).

Selain Korea Selatan, China merupakan negara Asia terdepan dalam pengembangan 5G sekitar 87% fasilitas 5G sudah dibangun di China dengan total 1.24 juta tower pemancar 5G tersebar di seluruh daratan China. Ada dua perusahaan besar yang membantu percepatan 5G di China yaitu Huawei dan ZTE. Sedangkan khusus untuk Huawei mendapat nilai kerja sama sekitar 506.733 juta Yuan dalam pembangunan 5G di China tahun 2019 (Huawei Annual Report, 2018).

Dalam penerapan komersial global jaringan 5G, Huawei juga mendirikan pusat inovasi bersama 5G dengan operator yang ada

di Eropa, bertujuan untuk terus mendorong penerapan komersial dan inovasi layanan 5G. Selain itu, Huawei bekerja dengan operator dan mitra industri di seluruh dunia untuk mengeksplorasi penerapan 5G di lebih dari 300 proyek, yang mencakup lebih dari 20 industri. Menjadikan Huawei salah satu yang terdepan dalam pengembangan 5G (Huawei Annual Report, 2018).

Keunggulan dalam pengembangan jaringan 5G menjadikan Huawei salah satu pesaing tekuat perusahaan-perusahaan AS, jika dibandingkan biaya produksi dan penjualan produk milik Huawei jauh lebih ekonomis dengan selisih harga yang cukup jauh, sebagai contoh pada estimasi biaya pemasangan tower pemancar jaringan atau *Base Station* 5G berikut:

Tabel 2. Biaya Pemasangan 5G Base Station

Perusahaan	Negara	Biaya Pemasangan perStation Base 5G
Huawei	China	US\$ 20,000
AT&T	Amerika Serikat	US\$ 54,737-250,000
Ericson	Swedia	US\$ 76,000
Casio	Jepang	US\$ 45,000
SK Telcom	Korea Selatan	US\$ 27,000

Sumber: 5G & Mobile Strategies, Mike Dano, tersedia di [www. Lightreading.com](http://www.Lightreading.com).

Dari data yang ditampilkan di atas, menunjukan bahwa Huawei menjadi vendor penyedia layanan 5G paling ekonomis dengan estimasi biaya pembangunan *station base* 5G hanya mencapai US\$ 20,000, jauh lebih murah dibandingkan AT&T yang harga terendahnya mencapai US\$ 54,737. Namun dalam persaingan bisnis moderen harga bukan menjadi faktor utama dalam menentukan keunggulan persaingan tetapi kepercayaan konsumen adalah hal yang utama. Faktanya harga murah dalam pembangunan *station base* 5G Huawei memang menjadi tantangan yang besar bagi teknologi 5G AS.

Walaupun pada dasarnya segmen pasar AS berbeda dari Huawei dalam

pengembangan 5G, dan nilai jual utama perusahaan-perusahaan AS adalah kepercayaan konsumen dengan jaminan keamanan yang ditawarkan. Namaun kehadiran Huawei di pasar AS dengan harga yang lebih ekonomis dan teknologi yang sama dikhawatirkan akan merusak pasar domestik AS.

AS berupaya memproteksi pasar domestik yang merupakan bagian penting dalam upaya AS memenangkan pasar 5G, pasar domestik AS dalam pengembangan 5G cakupannya cukup luas. Dimulai pendanaan penelitian dasar, pendidikan STEM (*Science Technology Engenering Math*), dan pelatihan tenaga kerja serta industri semikonduktor dan produsen lokal AS tujuannya untuk mempertahankan daya saing teknologi. Selain itu pasar domestik 5G AS juga meliputi konsumen dan perusahaan AS dengan 200 juta pelanggan potensial (CSIS, 2021).

Dalam pasar domestik 5G diperlukan peran serta dukungan pengusaha dan perusahaan, untuk mengidentifikasi peluang 5G dan mengkomersialkannya dengan menggunakan kerja sama yang sudah terjalain dalam upaya memenangkan pasar 5G, AS menetapkan *Intentional* Proteksionisme kepada Huawei dalam NDAA 2019. Untuk melarang penggunaan produk Huawei atas alasan keamanan dan mengisntruksikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan AS dan perusahaan-perusahaan yang terkait untuk beralih menggunakan perangkat lain yang disetujui, pelarangan penggunaan produk Huawei juga didukung kebijakan "*Rip and Replace*" untuk operator yang masih menggunakan peralatan telekomunikasi China (CSIS, 2021), menggunakan dana sebesar 1,9 miliar US\$ yang disediakan oleh Kongres.

2. Penolakan Terhadap Produk Huawei Karena Alasan *Dumping* dan Dugaan Pelanggaran HAM

Selain adanya persaingan bisnis dalam pasar 5G, AS mencurigai adanya indikasi kebijakan *dumping* pemerintah China kepada produk-produk asal China didasari dari protes perusahaan-perusahaan AS yang berasal dari Ohio dan Tennessee yang menganggap China

memberi subsidi beberapa barang yang di import ke AS. Hal ini yang dianggap tidak adil oleh perusahaan-perusahaan AS, melalui data yang disampaikan departemen perdagangan AS. China mensubsidi biaya produksi sekitar 55% hingga 109% melalui beberapa program yang di bawa pemerintahan China, salah satunya pemberian pajak dan kredit ekspor senilai US\$ 90 juta (Dano, 2019).

Memang tidak ada bukti nyata Huawei merupakan bagian dari penerima subsidi pemerintahan China dan melakukan *dumping* di AS, namun di China ada program subsidi untuk setiap karyawan yang ingin membeli produk Huawei dengan bantuan langsung sekitar 10% bahkan lebih tergantung setiap kebijakan perusahaan. Hali ini merupakan bentuk dukungan perusahaan-perusahaan China terhadap Produk Huawei, ada sekitar 20 perusahaan yang berkomitmen meningkatkan penggunaan produk Huawei. Seperti yang dilakukan salah satu perusahaan elektronik *China Funcun Technology*, bukan hanya memberikan subsidi pada karyawannya perusahaan ini juga memerikan bonus sekitar US\$ 14.5 hingga US\$ 72.5 jika membeli *smartphone* Huawei di sampai akhir tahun 2018 (Dano, 2019).

Sebenarnya secara kosnsep Huawei dikatakan melakukan *dumping* jika Huawei terbukti melakukan praktik mengeksport barang dengan harga yang lebih rendah daripada nilai seharusnya di pasar domestik. Dan hal tersebut sudah diatur jelas dalam Perjanjian *Anti-Dumping* tahun 1994. Isinya adalah sebuah perjanjian dagang internasional yang memberikan hak kepada negara-negara anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk mengambil tindakan *anti-dumping* apabila tindakan *dumping* mengakibatkan kerugian terhadap industri domestik (*General Agreement on Tariffs and Trade, 1994*).

Dalam kasus pemberian subsidi perusahaan-perusahaan China kepada Huawei memang tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan *dumping*, walaupun jelas tujuan subsidinya untuk meingkatkan penggunaan produk Huawei tetapi pengaruhnya terhadap expor ke AS tidak dapat di buktikan. Namun dalam pembangunan *station base* 5G milik

Huawei yang estimasi harganya lebih murah 55% dibandingkan harga terendah pembangunan *station base* 5G perusahaan-perusahaan asal AS, memperkuat argumen adanya kegiatan *dumping* dari Huawei yang dapat merusak nilai pasar AS (Dano, 2019), atas dasar hal tersebut kecurigaan AS semakin kuat terkait kemungkinan adanya *dumping* yang dilakukan Huawei.

Untuk mengatasi dugaan *dumping* dari Huawei dan produk-produk barang dan jasa asal China, AS sebenarnya sudah mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi tarif perdagangan dengan China. Pada tahun 2018, AS melakukan penerapan tarif sebesar US\$ 34 miliar untuk barang dan jasa asal China dan Penerapan Tarif tambahan 10% pada setiap kegiatan dagang yang mencapai US\$ 200 miliar (*The US Sanction on Huawei*, 2018).

Selain isu ekonomi berupa dugaan *dumping*, pemerintahan AS juga menuduh Huawei terlibat dalam pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) kepada komunitas muslim Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang. Huawei dituduh terlibat dan memberikan dukungan pemerintahan China dalam pemberlakuan kamp-kamp bagi minoritas di Xinjiang (Kelly, 2019).

Tuduhan pemerintahan AS didasari dari oleh laporan dari Institut Kebijakan Strategis Australia bahwa "Huawei bekerja secara langsung dengan Biro Keamanan Publik Pemerintah China di Xinjiang dalam berbagai proyek dan adanya indikasi kerja paksa orang-orang Uighur sebagai pemasok semikonduktor bagi Huawei dan perusahaan lain asal China", namun faktanya proyek yang dikerjakan Huawei adalah perekaman data digital dan data biometrik bagi etnis minoritas Xinjiang hal tersebut merupakan bagian penting untuk mendukung *Government Surveillance* bagi pemerintahan China (Sabbagh, 2020).

Proyek tersebut dimulai tahun 2018, dengan tujuan membuka era baru kepolisian yang cerdas dan membantu membangun masyarakat yang lebih aman dan lebih cerdas. Tetapi AS secara tegas menuduh proyek teknologi AS di Xinjiang bertujuan untuk dapat digunakan pemerintah guna memantau dan menaklukkan jutaan warga Uighur dan

anggotanya serta kompek etnis Muslim lainnya di Xinjiang (Kelly, 2019).

Huawei merespon tuduhan pemerintahan AS dengan menyatakan bahwa Huawei adalah perusahaan swasta yang menyediakan produk TIK yang sesuai dengan standar industri, serta bekerja sama dengan semua mitra guna mendorong inovasi dan perkembangan teknologi (Pulford, 2020). Namun pembelaan yang disampaikan Huawei tidak diterima begitu saja oleh pemerintahan AS, dengan fakta yang adapemerintahan AS secara tegas menjatuhkan sanksi pada Huawei di akhir tahun 2019.

Mentri Luar negeri AS Mike Pompeo mengumumkan bahwa Departemen Luar Negeri akan memberlakukan pembatasan visa pada karyawan raksasa teknologi China Huawei, dengan mengatakan pembatasan itu dimaksudkan untuk menghukum keterlibatan dalam pelanggaran HAM serta pembatasan tersebut memperkuat argumen alasan pelanggaran terhadap produk Huawei terkait alasan keamanan dan juga kesehatan karena ada indikasi perbudakan yang dilakukan Huawei di China untuk meningkatkan produksi Huawei. Pompeo mengatakan Huawei adalah tangan kanan dari PKC (Partai Komunis China) dalam kegiatan penangkapan pembangkang politik dan pengadaan kamp-kamp massal di Xinjiang serta perbudakan paksa penduduknya yang dikirim ke seluruh China (Pulford, 2020).

Dugaan *dumping* dan pelanggaran HAM yang ditujukan pada Huawei merupakan bentuk nyata dari pemberlakuan *Incidental Protectionism*. Seperti penetapan evaluasi tarif dengan China tidak secara langsung di tujukan pada produk Huawei, namun dampaknya secara tidak langsung berpengaruh pada Huawei karena komoditas barang dan jasa yang diduga melakukan *dumping* yaitu salah satunya ekspor peralatan teknologi (*The US Sanction on Huawei*, 2018), yang mendapat evaluasi tarif berkaitan juga dengan operasi bisnis Huawei. Serta tuduhan terlibat pelanggaran HAM yang digunakan AS dalam *Incidental Protectionism* untuk membawa isu non perdagangan kedalam pembatasan produk Huawei di AS yang secara jelas semakin

melemahkan posisi Huawei di pasar AS.

3. Ketidakamanan Produk Huawei

NDAA 2019 adalah Undang-undang yang fungsinya untuk mendanai dan memberikan wewenang pada Militer AS untuk menjaga keamanan nasional AS. Tujuannya untuk mempertahankan keunggulan militer serta mempertahankan tatanan internasional yang telah melindungi dan memajukan keamanan, kemakmuran, kebangsaan warga AS serta sekutu dan mitra AS (John S. McCain, *H.R.5515, 2019*).

Argumen utama dalam NDAA 2019 terkait pelarangan penggunaan produk Huawei adalah alasan keamanan. Isu keamanan dalam produk Huawei bukanlah hal yang baru bahkan dari awal keberadaan Huawei di AS pun sudah mendapatkan respon negatif pemerintahan AS, hal tersebut didasari dari latar belakang Huawei yang didirikan oleh seorang mantan prajurit tetara PLA yaitu Ren Zhengfei yang dikhawatirkan dapat mengancam keamanan nasional AS.

Bukan hanya latar belakang perusahaan AS ini yang menjadi masalah keamanan tetapi Huawei juga merupakan salah satu perusahaan yang banyak melanggar peraturan di AS pelanggaran tersebut berupa pencurian hak kekayaan intelektual, kegiatan perdagangan melanggar hukum dan kegiatan spionase.

Tabel 3. Pelanggaran Huawei Tahun 2008-2014

Tahun	Bentuk Pelanggaran
2008	Adanya pembatalan kesepakatan akuisisi 3Com Corporation karena pemerintah AS menyelidiki potensi risiko keamanannasional yang ditimbulkan oleh akuisisi Huawei.
2010	Huawei kehilangan tawaran untuk membeli unit peralatan nirkabel Motorola. Krena Motorola menggugat Huawei dengan tuduhan pencurian rahasia dagang.
2011	Perselisihan Huawei dan Nokia mengenai hak kekayaan intelektual yang digunakan Nokia Siemens Network (NSM) senilai 1.2 miliar Dolar AS dari Motorola.
2012	Perusahaan komunikasi asal Kanada Nortel memuduh Huawei sebagai penyebab kebangkrutan perusahaan ini di tahun 2009, karena telah meretas data pribadi perusahaan dan menyalin instruksi manual perangkat keras milik Nortel.
2014	T-Mobile AS mengugat Huawei atas tuduhan pencurian teknologi merka di Bellevue, Washington yang dilakukan karyawan Huawei dengan cara menyelipkan ke lab rahasia T-Mobile. Dan muncul pula dugaan Spionase pada pemerintahan AS.

Sumber: US District Court, INDICIMENT Huawei, No. CR19-010 RSM

Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Huawei seperti yang ada pada tabel di atas, menjadi salah satu alasan utama mengapa pemerintah AS menetapkan Huawei sebagai ancaman bagi keamanan nasional di AS. Serta munculnya kekhawatiran pemerintah AS dengan ancaman Spionase China melalui Huawei berdasarkan Undang-undang Intelejen Nasional China tahun 2017 Bab I dan Bab II pasal 7, yang berbunyi semua organisasi dan warga negara harus mendukung, membantu, dan bekerja sama dalam upaya intelejen nasional sesuai dengan hukum, dan harus melindungi rahasia kerja intelejen nasional yang mereka ketahui (Girard, 2019).

Lalu pada Pasal 10, untuk keperluan kerjanya, lembaga kerja intelejen nasional harus menggunakan saran, taktik, dan koneksi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan intelejen, di dalam maupun luar negeri (Girard,

2019). Kecurigaan terhadap Huawei berdasarkan UU Intelijen Nasional China juga terbukti dari kegiatan spionase yang dilakukan Huawei pada Kasus T-Mobile yaitu pencurian teknologi robot pengujian *smartphone* yang diberi nama Tappy. Kasus ini berakhir di tahun 2017 dimana pengadilan federal di Distrik Timur Texas memberikan sanksi kepada Huawei dengan tuduhan kegiatan spionase di industri AS dan menjatuhkan denda sebesar 4,8 juta US\$ (*Indicement Huawei, 2019*).

Dari pelanggaran yang dilakukan Huawei terkait kegiatan spionase memunculkan isu ketidakamanan digital produk Huawei, dengan digunakannya produk Huawei oleh individu atau kelompok yang berhubungan dengan Pemerintahan AS. Memungkinkan terjadinya *Unauthorized acces* atau akses tidak sah, kegiatan spionase *Non-violance*, menggunakan peralatan teknologi, memanfaatkan jaringan telematika global, yang perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kerugian material maupun immaterial yang cenderung lebih besar dari kejahatan konvensional. Selain itu tindak kejahatan digital dapat dikategorikan sebagai *cybercrime* dalam bentuk penyadapan seperti *Unauthorized Acces to Computer System and Service, Cyber Espionage, Infringements of Privacy*, dan *Cyber-stalking* (Didik, 2005).

Adapun pelanggaran Huawei yang menjadi dasar kuat pemerintahan AS untuk melarang Huawei di AS adalah pelanggaran *Export Adinistrasion Regulation* (EAR) AS. Pelanggaran tersebut dilakukan perusahaan SKYCOM TECH CO., LTD. Yang merupakan anak perusahaan Huawei dan Huawei Holdings di dakwa oleh Pengadilan AS, bahwa Skycom adalah perusahaan yang terdaftar di Hong Kong yang operasi utamanya berada di Iran. Kecurigaan pemerintahan AS atas keterlibatan Huawei pada operasi bisnis Skycom sudah ada dari tahun 2013 dari beberapa dokumen yang di publikasi *Reuters*, namun pada saat itu belum ada bukti nyata yang didapat pemerintahan AS atas keterlibatan Huawei (www.reuters.com, 2021).

Oleh karena itu, pada tahun 2013 AS

belum bisa memberikan sanksi apapun pada Huawei dan hanya melakukan penyelidikan pada kasus ini. Pelanggaran ini juga melibatkan Meng Wanzhou, juga dikenal sebagai “Cathy Meng” atau “Sabrina Meng,” adalah warga negara China sekaligus putri dari Ren Zengfei. Pada sekitar tahun 2010, Meng menjabat sebagai *Chief Financial Officer* Huawei dan sekitar Februari 2008 dan April 2009, Meng menjabat sebagai Dewan Direksi Skycom serta beberapa tahun, Meng juga menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Direksi Huawei (*INDICIMENT Huawei, 2019*).

Meng Wanzhou didakwa pengadilan AS memberikan pernyataan palsu kepada otoritas Hong Kong, terkait kepemilikan Skycom dan keterlibatannya dalam melakukan kegiatan perdagangan dengan Iran yang sudah dijatuhi Sanksi embargo oleh pemerintahan AS. Hingga akhirnya Meng Wanzhou pada 1 Desember 2018 di tangkap oleh otoritas di Kanada terkait dakwaan tersebut dan harus menghadapi persidangan atas dakwaan pemerintahan AS.

Upaya pelarangan ini juga merupakan bentuk nyata pemerintahan AS untuk memproteksi pasar AS dari setiap ancaman keamanan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pemerintahan AS berupaya menertibkan setiap negara, perusahaan, dan entitas bisnis yang ingin berada di pasar AS harus patuh terhadap segala peraturan yang berlaku di AS. Serta pelarangan terhadap Huawei ini juga menjadi senjata pemerintahan AS untuk memaksa China berhenti berhubungan dengan Iran yang menerima sanksi perdagangan AS, dengan menunjukkan ketegasan pemerintah AS pada siapapun yang mencoba melanggar sanksi tersebut akan ditindak tegas oleh AS dan hal tersebut merupakan bentuk nyata dari *Instrumental Protectionism*.

KESIMPULAN

Keberadaan Huawei di AS sebenarnya bukan menjadi ancaman besar untuk persaingan pasar AS terbukti dari *market share* perangkat Huawei di AS tergolong rendah, pada akhirnya kebijakan pelarangan AS ini malah bertentangan dengan mekanisme

persaingan pasar sempurna dan nilai inti dari liberalisme serta kapitalisme yang diusung AS serta penetapan kebijakan ini juga berpotensi melanggar asas resiprokal dengan China yang berdampak negatif pada hubungan kedua negara.

Terlepas dari fakta tersebut, pelarangan penggunaan produk Huawei berdasarkan Undang-undang Otoritas Pertahanan Nasional AS tahun 2019 atau NDAA 2019, didasari tiga alasan. Pertama adalah alasan keinginan AS memenangkan pasar 5G, pengembangan 5G menjadi sangat penting bagi AS dikarenakan pembangunan infrastruktur 5G sangat dibutuhkan AS untuk menunjang mobilitas digital baik pada sektor industri maupun sektor pemerintahan AS.

Alasan kedua adalah penolakan produk Huawei karena alasan *dumping* dan dugaan pelanggaran HAM, pemerintahan AS menduga Huawei menjadi salah satu perusahaan asal China yang mendapatkan subsidi besar untuk dapat menekan harga jual di pasar AS. Serta adanya tuduhan pelanggaran HAM terkait dukungan Huawei kepada pemerintahan China atas pengadaan teknologi perekaman data digital dan data biometrik di wilayah Xinjiang.

Alasan yang terakhir adalah ketidakamanan produk Huawei, dalam NDAA 2019 terkait pelarangan penggunaan produk Huawei isu keamanan menjadi alasan utama menolak keberadaan Huawei di AS. Didasari dari latar belakang Huawei yang didirikan oleh seorang mantan prajurit tentara PLA yaitu Ren Zhengfei yang dikawatirkan dapat mengancam keamanan nasional AS, dan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran hak kekayaan intelektual di AS juga tuduhan spionase Huawei berdasarkan UU Intelijen nasional China pasal 7 dan 10 serta pelanggaran regulasi ekspor AS atau EAR terkait embargo perdagangan Iran. Ketiga alasan tersebut menjadi alasan kuat diberlakukannya NDAA 2019 dalam upaya memproteksi pasar AS.

REFERENSI

Ahters, Nathael. 2013. "China's Competitiveness, Myth, Reality, and Lesson the United State and Japan", *Case Study: Huawei*. CSIS.

"Code of Federal Regulations", bagian 736 tersedia di [https:// www.efcr.gov/](https://www.efcr.gov/).

"Chinese Telecommunications Conglomerate Huawei and Huawei CFO Wanzhou Meng charged With Financial Fraud" tersedia di <https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-telecommunications-conglomerate-huawei-and-huawei-cfo-wanzhou-meng-charged-financial>.

Dano, Mike. 2019. "5G & Mobile Strategies". tersedia di [www. Lightreading.com](http://www.lightreading.com).

Didik M. Arief Mansur, Elisatris Gultom. 2005. "Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi". Refka Aditama. Bandung.

Dunkley, Graham, 2004. "Free Trade : Myth, Reality, and Alternatives". New York: Palgrave Macmillan.

Executive Summary. 2021. "Accelerating 5G in the United States, CSIS Working Group on Trust and Security in 5G Networks". by the Center for Strategic and International Studies.

"Exclusive: Huawei Hid Business Operation in Iran Reuters Reported Links to CFO", tersedia di <https://www.reuters.com/aricel/us-huawei-iran-proble-excusive/>.

General Agreement on Tariffs and Trade 1994, Article VI.

Girard, Bonie. "The Real Danger of China's National Intelligence Law". tersedia di <https://www.thediplomat.com/2019/02/the-real-denger-of-chinas-national-intelligence-law>.

"Global 5G Sales Penetration in January 2021" tersedia di <https://www.counterpointresearch.com/global-5g-smartphone-sales-penetration-2021/>.

- Huawei in America, Innovation, Innovation lies. at the core of huawei's a global success 2012*", tersedia di, <http://www.eu-Huawei.com/ushuawei-in-america/innovation/>.
- Kelly Laura and Crhris Millis Rodrigo. "US announces on Huawei. Chiting Human Rrghts Abuses". tersedia di <https://thehill.com/policy/technology/>
- Levy, I Philip. 2009. "Imaginative Obstruction Modern Protectionism in the Global Economy,". Georgetown Journal of International Affairs.
- McCain, John S. 2019. H.R.5515 – "National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019". US GOV.
- "Mobile Vendors Market Share United State Of America". 2019. tersedia di <https://gs.satecounter.com/vendors-market-share-/mpbail/united-satate-of-america/>.
- National Science Board. 2018. "Science and Engineering Indicators". US Gov
- Sabbagh Dan, "Tory MP Asks BT if Using Huawei Complies With Anti-Salavery Policy". Terdapat di <https://www.theguardian.com/technology/troy-mp-askes-bt-using-huawei-complies-anti-salavery-policy>.
- Salvatore, Dominic, 1993. ed. Protectionism and World Welfare. Cambridge University Press.
- Steinbock, Dan. 2012. "The Case for Huawei in America. Prospect of Multipolar World Economy in the 21st Century". Tersedia di www.differencegroup.net.
- Tao, Tian and Wu Chunbo. 2015. "Huawei Story." California. SAGE Publication Inc.
- "The US Sanction on Huawei". Geopolitic as a dreaming factor in busieness strategy. Univesitat Pompeu Fabra Barcelona.
- US Distric Court. 2019. "Indiciment Huawei. No. CR19-010 RSM". Seattle. 115TH Congres 1st Seesion. 2017. "National Defense Authorization Act Facial Year "2018". H.R. 2810. U.S. Washington. Government Publishing Office.
- "2018 Annual Report". Huawei Investment & Holding Co., Ltd. Tersedia di www.huawei.com.
- "2019 Annual Report". Huawei Investment & Holding Co., Ltd. Tersedia di www.huawei.com.
- "2020 Annual Report". Huawei Investment & Holding Co., Ltd. Tersedia di www.huawei.com